



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERIC ROSSI PRYO NUGROHO
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 203548

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/85 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 534.000.000

1. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, VESPA PIAGGIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 62.450.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 625.556.689

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 622.912.661

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.494.919.350

III. HUTANG

Rp. 115.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.379.919.350



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.